

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ateng Syafruddin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bandung : Binacipta, 1985.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, , Bogor : Ghalia Indonesia, 2004.
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci, *Dokumen RPI2JM Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020*, 2014.
- Djohermansyah Djohan, *Problematic Pemerintahan dan Politik Lokal*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet I, 1990.
- Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama, 2010.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011.
- Maringan Marsy Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* , Jakarta: Gramedia, 2003.
- Novan Ardy Wilyani, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Rian Nugroho D, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Jakarta: Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000.
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1978.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suriansyah Murhani, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama (cet.1), 2008.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta : Andi Offset, 1989.
- Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1994.

Yuliani Nurani, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Indeks, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pendirian Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

JURNAL

Amalia Diamantina, *Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemmerintahan Daerah Yang Efektif dan Efisien*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010.

Dewirahmadanirwati, *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah Sumatera Barat*, JURNAL JIPS, Vol.2 No. 3, 2018.

Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume II, No. 1, Maret 2007, hlm. 36

Nafisakhatul Layliyah, *Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara*, Palembang: FISIP Universitas Sriwijaya, 2019.

Retiya Susanti, *Kewenangan Pemerintah yang Bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan*, Palembang: FISIP Universitas Sriwijaya, 2018.

Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1, 2019.

WEBSITE

Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Pengertian Kewenangan*, <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>, diakses pada tanggal 06 April, Pukul 09.10 WIB.

Dr. (CAND) Ardiansyah, S.H., M.H., *Fokus Kajian Teori Kewenangan*, <https://customslawyer.wordpress.com/2014/09/18/fokus-kajian-teori-kewenangan/>, diakses pada tanggal 06 April 2020, pukul 09.48 WIB.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengawasan>, diakses pada tanggal 03 Desember 2020, Pukul 16.59 WIB.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang>, diakses pada tanggal 03 Desember 2020, Pukul 16.59 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *PAUD dan DIKMAS, Layanan Yang Wajib Disediakan Pemerintah*, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/03/paud-dan-dikmas-layanan-wajib-yang-harus-disediakan-pemerintah>, diakses pada tanggal 10 April 2020, Pukul 07.58 WIB.

Vishal Aji Armansyah, *“Deskriptif Adalah”*, <https://rumus.co.id/deskriptif-adalah/>, diakses pada tanggal 13 April 2020, Pukul 09.10 WIB.

Devania, Annesa, *“Wawancara Mendalam (indept Interview)”* <http://www.ut.ac.id/html/teknikwawancara.htm>, diakses tanggal 12 Maret 2021, Pukul 10.32 WIB